



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

|             |   |
|-------------|---|
| Judul       | : Ada tempat khusus demo di DPR, usulan Menteri HAM picu pro kontra |
| Tanggal     | : Selasa, 16 September 2025   |
| Surat Kabar | : Rakyat Merdeka  |
| Halaman     | : 2   |

Ada Tempat Khusus Demo Di DPR

## Usulan Menteri HAM Picu Pro Kontra

Usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natáliaus Pigai agar disediakan tempat khusus untuk demo di Kompleks DPR, sebuah menjadi perbicangan hangat. Pro kontra atas usulan tersebut pun tak bisa dihindarkan.

Pigai menjelaskan, rakyat harus diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi. Termasuk dalam menyampaikan aspirasi secara langsung di Kompleks DPR. "Negara berhak dan berkewajiban menyediakan ruang demokrasi bagi rakyat," kata Pigai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

Dia menambahkan, seluruh negara harus menyediakan ruang untuk menyampaikan pendapat pikiran dan perasaan. Kendati demikian, Pigai menyebut usulan itu belum disampaikan langsung ke DPR. "Namanya juga usulan. Ini usulan ya. Ini baru usulan," katanya.

Sebelumnya, usulan itu dia sampaikan untuk menanggapi

demonstrasi besar-besaran, yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia belakangan ini. Menurut dia, kantor-kantor yang halamannya besar seperti DPR bisa dibikin tempat unjuk rasa.

"Jadi pusat demokrasi. Tapi kantor yang space-nya kecil, itu bisa berujung rasa di tempat yang disediakan," ujar Pigai saat mengunjungi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Bali, Denpasar, Jumat (12/9/2025).

Pigai pernah tempat berdemonstrasi itu idealnya mampu menampung 1.000 hingga 2.000 orang. Selain itu, dia menyarankan pimpinan atau perwakilan lembaga untuk menemui massa aksi dan menampung aspirasi mereka.

"Ke depan itu, harus bisa punya peraturan untuk setiap pengunjuk rasa, pimpinan kantor atau perwakilan harus terima, jangan sampai close," imbuhnya.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mendukungnya. Politisi Partai NasDem ini menilai, usulan Pigai ini sama dengan usulan DPR yang belum terlaksana.

"DPR pernah memproses usulan pembangunan plaza demokrasi, namun hal itu tertunda karena beberapa alasan," jelas Willy kepada *Rakyat Merdeka*, Senin (15/9/2025).

Dari pihak yang kontra, ada Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Dia menilai, pembangunan area khusus demonstrasi tidak efektif.

"Ruang demonstrasi itu bisa dianggap sekadar aksesori saja, jika watah DPR tidak demokratis," cetus Lucius kepada *Rakyat Merdeka*, Senin (15/9/2025).

Untuk mengetahui pandangan selengkapnya dari Willy Aditya dan Lucius Karus mengenai usulan menyediakan tempat khusus demonstrasi di DPR, berikut wawancaranya.

**WILLY ADITYA**  
Ketua Komisi XIII DPR

### Bagian Dari Tingkatkan Kualitas Demokrasi



Bagaimana Anda melihat usulan Menteri HAM Natáliaus Pigai agar ada tempat khusus demo di Gedung Pemerintahan segeri di halaman Gedung DPR-RI?

Selagi sebuah usulan, saya kira apa yang disampaikan Menteri HAM layak dilaburasi lebih jauh. DPR pernah memproses usulan pembangunan plaza demokrasi sebagai lokasi untuk publik menyatakan pikiran dan pendapat.

Kemari tidak dilanjutkan?

Hal tersebut ditunda, karena berbagai alasan, seperti auran keamanan objek vital penyelegaran negara.

Terkait usulan Menteri Pigai ini, apa langkah yang akan diambil oleh Komisi XIII DPR selaku mitra kerjanya?

Tentu kami dan Komisi XIII DPR akan segera diskusikan hal ini dengan Menteri HAM.

Bagi yang menolak, penyampaian

pendapat bukan soal tempat khusus semata, namun sikap dari anggota DPR dalam merentra aspirasi masyarakat.

Di bawah segala bahkan bukan hanya gedung parlemen yang mudah diakses publik bahkan untuk berdemonstrasi. Gedung pengadilan, istana Presiden, dan lainnya juga demikian.

DPR Komisi XIII tentu akan menyambut baik usulan untuk meningkatkan kualitas demokrasi perwakilan ini sebagai ruang kebebasan berekspresi.

Bagaimana dengan kritik agar anggota dewan lebih mendengarkan aspirasi masyarakat?

Mengingat ada hal lain yang juga esensial dari sekadar membuat ruang untuk demonstrasi di DPR. Yaitu soal bagaimana suatu publik dapat difidirkan, diserap, dan diakses menaiki kohesi dan koherensi. Masyarakat ini yang perlu kita didukung berarama-arama ini yang perlu kita didukung berarama-arama. Bagaimana Hak Asasi Manusia

dalam sipli dan politik, bisa menjadi optimal diikola untuk kemanfaatan bersama.

Pasca kejadian demo berujung kerusuhan akhir Agustus lalu, ada perbaikan dari DPR?

Sebagai rumah rakyat, DPR tentu terbuka untuk mendengarkan aspirasi dan berbagi suara publik. Semua anggota DPR bahkan setiap saat dapat dihubungi publik untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, bahkan prasarananya. Hal yang perlu diingat adalah, dalam menanggapi suara tersebut dikalibrasi menjadi kebijakan yang tepat, agar Pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya dengan tepat, jelas dan tegas.

Menurut Anda, apa yang lebih penting daripada usulan tersebut?

Masalah utama dalam hal pelaksanaan demonstrasi, kudu perangkat dengan seluruh DPR, tidak terbatas terhadap mereka yang mau menyampaikan aspirasi. Pembawa aspirasi dianggap pembuat rusuh sehingga DPR memilih untuk menjauh dari massa.

Berarti usulan ini tidak tepat ya?

Bagaimana Anda melihat usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natáliaus Pigai ini?

Sebenarnya para politisi Indonesia yang akhirnya membuat usulan tersebut, kita semua dibikin lupa dengan substansi soal bagaimana menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Jadi usulan demonstrasi sebagai ekspresi demokrasi, tidak bisa disela-sela dengan memoles kompleks DPR, dengan perahar baru bermunculan ruang demonstrasi.

Kalau soal lalu lintas yang kerap terjadi karena ada demo, bagaimana itu?

Ibu bukan salah demonstran semata. Jelas jelas DPR yang membentengi diri dari pendemo, sehingga massa terpaksa menggantung pengguna jalan di depan DPR. Banyak pendemo yang disalahgunakan DPR dan yang punya memanggil kompleks dengan tembok tinggi.

Bikin tempat khusus, kalau mental anggota DPR masih menganggap pendemo sama dengan kriminal, ya sisia sisia itu tempat khusus

demonstrasi.

**Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya** mengatakan mendeklarkan usulan ini dengan Menteri HAM ada tanggapan?

Mengherankan ketika ide Menteri HAM ini dilakukan oleh DPR, DPR seolah malah mengabaikan aspirasi masyarakat untuk menemui demonstrasi selama ini karena posisi aksi yang berada di luar gerbang. Karena itu dalam membangun tempat khusus di dalam kompleks, DPR akan bisa mendukung langsung aspirasi warga.

**Seharusnya bagaimana?**

Padahal kalau DPR memang mau memperbaiki dan mendengarkan aspirasi, itu bisa dilakukan dengan selama ini dengan membuka akses pintu masuk bagi pendemo yang ada di depan gerbang masuk.

Selain itu, DPR juga bisa lakukan ini. Mereka terlalu takut pada warga yang menyatakan pendapat melalui demonstrasi. ■ NMM

**LUCIUS KARUS**

Peneliti Formappi

### Mental DPR-nya Dulu Yang Harus Dibenahi



**“**  
Mau bikin tempat khusus, kalau mental anggota DPR masih menganggap pendemo sama dengan kriminal, ya sia-sia saja itu tempat khusus berdemonstrasi.

Bagaimana Anda melihat usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natáliaus Pigai ini?

Sebenarnya para politisi Indonesia yang akhirnya membuat usulan tersebut, kita semua dibikin lupa dengan substansi soal bagaimana menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Jadi usulan demonstrasi sebagai ekspresi demokrasi, tidak bisa disela-sela dengan memoles kompleks DPR, dengan perahar baru bermunculan ruang demonstrasi.

Kalau soal lalu lintas yang kerap

terjadi karena ada demo, bagaimana itu?

Ibu bukan salah demonstran semata. Jelas jelas DPR yang membentengi diri dari pendemo, sehingga massa

terpaksa menggantung pengguna jalan

di depan DPR. Banyak pendemo yang disalahgunakan DPR dan yang punya

memanggil kompleks dengan tembok tinggi.

Bikin tempat khusus, kalau

mental anggota DPR masih menganggap

pendemo sama dengan kriminal,

ya sisia sisia itu tempat khusus

demonstrasi.